

## ANALISIS PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Putri Widiya Marpaung<sup>1</sup>, Muhammad Yafiz<sup>2</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [marpaungputri917@gmail.com](mailto:marpaungputri917@gmail.com)

---

### Article History

Received: 02-09-2023

Revision: 06-09-2023

Accepted: 07-09-2023

Published: 09-09-2023

**Abstract.** This study aims to analyze the Role of Accounting Information Systems on Financial Management Accountability at the National Amil Zakat Board of North Sumatra Province. The research method used in this research is a qualitative method and this research approach uses descriptive analysis. The results of the research conclude that BAZNAS North Sumatra Province uses SIMBA (Zakat Information Management System) based on PSAK 109 to collect and distribute zakat, infaq and alms. The influence of the accounting information system on financial management at BAZNAS North Sumatra Province can be seen from the level of zakat receipts, and the implementation of accountability carried out by BAZNAS North Sumatra Province in financial management is in accordance with accountability indicators, namely implementing honesty and legal accountability, accountable procedures, programs accountable, and accountable regulations.

**Keywords:** Accounting Information System, Accountability, BAZNAS

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Zakat) berdasarkan PSAK 109 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tingkat penerimaan zakat, dan pada penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas yaitu menjalankan penerapan akuntabilitas kejujuran dan hukum, prosedur yang akuntabel, program yang akuntabel, dan peraturan yang akuntabel.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, BAZNAS

---

**How to Cite:** Marpaung, P. W., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3 (2), 310-320. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.224>.

---

### PENDAHULUAN

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat nasional sebagai organisasi yang sah dengan kekuatan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah dalam skala nasional. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Republik Indonesia membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan institusi yang mengelola zakat baik tradisional yaitu forum pemerintah tidak terstruktur mandiri, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri

agama. BAZNAS dapat bekerjasama dengan beberapa pihak terkait ketentuan perundang-undangan (pasal 4).

BAZNAS SUMUT dijadikan subjek penelitian, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan izin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat posisi BAZNAS sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi zakat secara nasional. dalam undang-undang BAZNAS adalah organisasi pemerintah nonstruktural otonom yang diakui secara hukum yang melapor kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam proses pengelolaan dana zakat, transparansi merupakan pengelolaan dana zakat yang terintegrasi dari muzaki mulai dari tahapan penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran dana zakat. Transparansi pengelolaan keuangan juga adalah upaya Amil Zakat untuk menyampaikan segala keprihatinan kepada Muwakki dalam bentuk informasi keuangan yang berhak memahami pertanggungjawaban pengelolaan.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beberapa pihak yang menjadi tanggung jawab kepada wali amanat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, akuntabilitas merupakan komponen yang sangat penting yang menjadi salah satu dasar pengelolaan zakat. Oleh karena itu , jika pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang mungkin berasal dari masyarakat itu sendiri dan dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat jika ditangani dengan sistem yang kompeten.

Sistem informasi akuntansi dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menyimpan laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem informasi dapat menjaga akuntabilitas aset yang telah dipelihara sehingga tidak ada yang dirugikan dalam melakukannya. Transparansi (terbuka) dan akuntabilitas (detail) mengelola uang zakat salah satu kepentingan untuk menjaganya kelancaran pengelolaan zakat pada lembaga petugas zakat. Jika pengertian dan terpercaya warga kekurangan lembaga petugas zakat, yang akan mengakibatkan warga menyalurkan dana secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat (Maulana & Ridwan, 2020) .

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Pengelolaan Zakat) berdasarkan PSAK 109 untuk mengumpulkan dan menyalurkan infak zakat lainnya. Selain itu, SIMBA juga memuat informasi pencatatan laporan keuangan, dan publikasi laporan keuangan di web [sumut.baznas.go.id](http://sumut.baznas.go.id). Pada website itu muzakki dapat mengetahui informasi mengenai BAZNAS karena website ini merupakan kantor BAZNAS digital. Setiap bidang

menginput datanya masing-masing untuk penyaluran dan penyaluran keuangan, kemudian bidang pengumpulan menginputnya ke SIMBA, setelah itu akan masuk notifikasi atau pemberitahuan zakat sudah masuk, selanjutnya publikasi laporan keuangan dilakukan sebulan sekali, enam bulan sekali. , bahkan setiap tahun. Kewajiban penyampaian laporan keuangan dilakukan dari BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS pusat, kemudian kepada Gubernur, dan BAZNAS kabupaten/kota kepada BAZNAS provinsi, kemudian kepada Bupati/Walikota.

**Tabel 1.** Pencapaian Koleksi BAZNAS Pusat Tahun 2022

No	Jenis Dana	Target 2022	Realisasi 2022 (Januari - Juni)	Pencapaian (%)
1	Zakat	606.480.000.000	360.856.852.257	59.5
1.1	Zakat Maal-Badan	100.000.000.000	135.204.554.769	135.2
1.2	Zakat Maal-Perorangan	256.000.000.000	111.879.740.866	43.7
1.3	Zakat Maal- Perorangan melalui UPZ	241.080.000.000	104.254.564.410	43.2
1.4	Zakat Fitrah	9.400.000.000	9.517.992.212	101.3
2	Infaq	116.606.000.000	12.849.245.278	11.0
2.1	Infaq tidak terikat	8.746.000.000	5.930.646.833	67.8
2.2	Infaq tidak terikat oleh UPZ	2.460.000.000	757.227.339	30.8
2.3	Infeksi terikat	47.500.000.000	3.118.413.450	6.6
2.4	dampak operasional	7.900.000.000	3.042.957.656	38.5
2.5	infeksi distribusi	50.000.000.000	0	0,0
3	CSR	19.600.000.000	14.651.642.012	74.8
3.1	Tanggung jawab sosial perusahaan	19.600.000.000	14.651.642.012	74.8
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	17.314.000.000	5.084.268.777	29.4
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	17.314.000.000	5.084.268.777	29.4
Jumlah		760.000.000.000	393.442.008.324	51.8

Sumber: Laporan Kinerja dan Keuangan BAZNAS Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat keberhasilan penting dalam pencapaian pengumpulan Zakat Maal Badan dan peningkatan penghimpunan zakat karena tingkat kepercayaan masyarakat dan perusahaan dalam membayar zakat kepada BAZNAS. Dengan manajemen yang efektif, sistem informasi manajemen yang canggih, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan muzakki dalam memutuskan membayar zakat di BAZNAS (Suginam & Siregar, 2020). Transmisi informasi yang cepat dan akurat diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan dana, termasuk Muzakki, Mustahiq, pemerintah, amil pengurus, dan masyarakat umum. Untuk

menyiasatinya, diperlukan suatu alat pengelolaan uang zakat berupa sistem informasi. Akuntabilitas dan transparansi kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan zakat.

Sistem informasi akuntansi yang kurang memadai di BAZNAS akan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara pembayaran zakat menjadi beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program pengumpulan dana zakat. Sementara itu, dipandang penting untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Sumut menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sehingga dapat tercapai dalam meningkatkan tujuan utama pemberdayaan muzakki dan kepercayaan masyarakat. Penggalangan dana sangat dipengaruhi oleh kepercayaan rakyat. Jika zakat dikelola secara efektif, itu akan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Memberi kepada mereka yang membutuhkan dan dapat menggunakannya secara maksimal dikenal sebagai zakat produktif dapat memberikan manfaat untuk perbaikan kesejahteraan sosial dan bukan hanya masalah uang belaka (Yahya et al., 2022)

Fakta bahwa BAZNAS Provinsi Sumut lokasi penerima zakat, infaq, dan sedekah besar setiap tahun adalah salah satu alasannya peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di sana. Penelitian sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh BAZNAS Sumut untuk memahami bagaimana BAZNAS Sumut beroperasi dalam meningkatkan tujuan pemberdayaan muztahik dan membangun kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Dalam penelitian sebelumnya Nur Hisamuddin (2018) tentang Akuntabilitas (detail) Laporan dibagian Keuangan Lembaga Petugas Zakat di mengupayakan Potensi bagian Zakat menentukan bahwa meningkat minat dan *brand* masyarakat dalam membayar zakat semakin meningkat meningkat, hal itu dapat diciptakan melalui kinerja LAZ yang akuntabel (detail), transparan (terbuka) dan profesional (bijak). Oleh karena itu lembaga petugas zakat memiliki laporan pengeluaran yang menjadi pedomannya manajemen keuangan profesional. Pada penelitian Nur Hisamuddin (2018) berkaitan dengan pengupayakan Potensi bagian Zakat meningkat minat dan *brand* masyarakat dalam membayar zakat semakin meningkat yang diciptakan melalui kinerja LAZ yang akuntabel (detail), transparan (terbuka) dan profesional (bijak) sedangkan pada penelitian ini Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Jadi, dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sistem informasi keuangan dan akuntansi di BAZNAS terus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

## **METODE**

Junis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada pada saat proses penelitian dilakukan, Karena pada penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang merupakan data menggambarkan rinci bukan data yang berupa angka angka. Hal ini merupakan karena pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memerlukan data deskriptif berbentuk kata kata tertulis atau lisan dari narasumber (Moloeng Lexy, 2018).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memahami makna, keyakinan, serta ciri-ciri umum seseorang atau kelompok tentang peristiwa kehidupan (Fitrah, dan Lutfiyah, 2017: 45). Penelitian ini mendeskripsikan data laporan pengelolaan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan menjelaskan secara kualitatif dengan kalimat penjas sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Medan Estate, kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

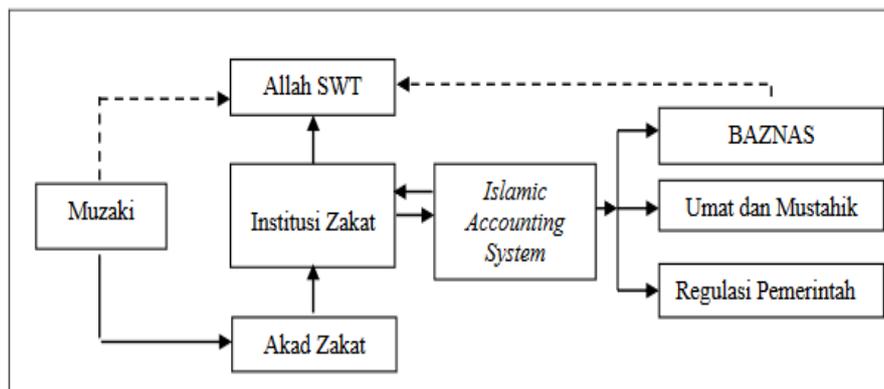
## **HASIL**

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya di Sumut. Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 186 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi, dan kebijakan Gubernur Sumut No. 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Sumut periode 2016-2017.

Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan cara untuk memberikan kemudahan dalam hal keamanan informasi yang memadai, efektif dan terjamin serta menciptakan alat komunikasi yang terkoordinasi antara manajemen untuk secara cepat dan efektif mengubah informasi keuangan menjadi informasi yang berkualitas tinggi. Sistem informasi akuntansi keuangan yang dikembangkan secara optimal dan pemantauan terus menerus dapat menyebabkan pelaporan masalah keuangan yang buruk. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, perlu ditingkatkan baik pengendalian intern penyelenggaraan keuangan daerah maupun penggunaan sistem informasi keuangan

daerah. . (Rianisanti, 201 8). Zakat yang diterima oleh penerima zakat (mustahik) dalam bentuk pembelanjaan dan penggunaan dana zakat di luar pedoman memerlukan landasan hukum yang kuat. Dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud “Sesungguhnya kecuali dia memberikan hukum di dalamnya, Allah SWT tidak mengetahui hukum nabi juga tidak pula hukum orang lain. Oleh karena itu Allah membagi zakat menjadi delapan bagian. dari bagian-bagian ini disertakan ( HR. Abu Dawud ).

Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tingkatannya penerimaan zakat , suatu informasi dapat dilihat dari dimensinya dimiliki oleh informasi Akuntabilitas dimiliki oleh BAZNAS menurut Hisham, tidak hanya akuntabilitas kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Pada Gambar 2.1 dapat diperhatikan jelas skema hubungan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pertanggungjawaban keuangan pada BAZNAS di Indonesia yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011, PP No.14 Tahun 2014 adalah menyiapkan laporan keuangan yang disiapkan dalam format akuntansi standar zakat finance 109, menyampaikan laporan setiap enam bulan dan berakhir tahun, dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan keuangan diperlukan akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dilakukan dengan baik dan untuk mencegah perbuatan menyimpang (Asmarani, Marlia, 2019) .



**Gambar 1.** Konsep Akuntabilitas

## DISKUSI

### Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan wawancara dengan Sofyan Arisyandi ST, sekretaris BAZNAS Provinsi Sumut mengungkapkan bahwa sistem informasi digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkan. Adanya sistem

informasi manajemen lembaga zakat yang menghimpun, menyalurkan dan melaporkan zakat, infak dan sedekah secara efektif dan efisien, setiap anggota lembaga (amil zakat) harus melakukan transaksi dengan cara tersebut. Sistem manajemen informasi ini digunakan untuk merekam data, mengumpulkan informasi, menyimpan data, dan menghasilkan laporan untuk setiap pekerjaan yang dibutuhkan oleh instansi atau organisasi yang dilayani oleh sistem informasi ini. Untuk menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini menggunakan SIMBA, sebuah perangkat lunak pengelolaan zakat berbasis sistem informasi. Masyarakat, pemerintah, pengurus amil, dan muzakki semuanya membutuhkan penyampaian informasi yang cepat dan tepat. Untuk menyalurkan hal tersebut diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam pengolahan data pendayagunaan uang zakat. Sistem informasi akan memudahkan pengelolaan informasi karena sistem informasi akuntansi merupakan bagian penting karena data dikelola (Rachim, 2017).

### **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Menurut Gusnawan Hasibuan S.Pd, Bagian Umum BAZNAS Provinsi Sumut mengungkapkan, Kurangnya minat orang terhadap zakat bukanlah akibat dari keengganan mereka. zakat kepada pengelola zakat, namun ini bukan karena kurangnya pengetahuan atau kepercayaan diri. Masih ada muzakki yang memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung, tanpa melalui lembaga pengelola zakat, hingga saat ini. Sejauh mana dana zakat diterima tergantung pada keakuratan data akuntansi. Akuntabilitas dan keterbukaan berdampak pada bagaimana zakat, infaq, dan sedekah dikumpulkan.

### **Akuntabilitas Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Sumut**

Bagian dari kewajibannya kepada muzakki dan masyarakat, lembaga amil zakat wajib melaporkan operasional dan keuangannya. Sebab, pada hakikatnya uang yang terkumpul oleh BAZNAS Provinsi Sumut bukan milik ormas resmi manapun melainkan diberikan kepada muzakki untuk disalurkan sesuai syariat. Oleh karena itu, lembaga amil wajib mempublikasikan data keuangan dan kinerja. Laporan keuangan berkala harus disajikan secara terbuka dan jujur guna membangun akuntabilitas, organisasi nirlaba dan sektor publik perlu memiliki berbagai karakteristik. Menurut penjelasan Ellwood tahun 1993, terdapat empat aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi, yaitu:

### *Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum*

Pertanggungjawaban yang jujur akan menghindari terjadinya bahaya dalam mengolah dana zakat, infak, dan sedekah. Pihak penanggung jawab BAZNAS Sumut terhindar dari korupsi dan kolusi. Setiap transaksi yang terjadi di BAZNAS didokumentasikan dengan jelas dan dipindahkan ke pembukuan di rekening keuangan yang bersangkutan sebagai bukti. BAZNAS Sumatera Utara berpegang pada hukum yang sesuai dengan syariah, hukum yang berlaku pemerintah, dan norma-norma yang diakui, yaitu (1) BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS mengacu pada Q.S. At- Taubah ayat 60 dan 103 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 277, yang merupakan landasan hukum fundamental dan aturan agama Islam, (2) UUD No. 23 Tahun 2011 dirujuk sebagai amandemen UUD No. 38 Tahun 1999 oleh BAZNAS dalam situasi ini, (3) Meskipun BAZNAS telah menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 109), laporan keuangan tetap dibuat menggunakan standar tersebut, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

### *Akuntabilitas Proses*

Sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi semuanya harus memadai untuk pekerjaan yang ada agar proses tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. BAZNAS Sumut memiliki aplikasi SIMBA ( sistem informasi BAZNAS) yang terhubung dengan aktualisasi proses akuntabilitas. Sebuah sistem bernama SIMBA dibuat dan dikembangkan untuk menampung data dan informasi milik BAZNAS di tingkat nasional. Selain itu, SIMBA memiliki kemampuan untuk mencetak laporan keuangan. Program berbasis web ini terpusat sehingga semua organisasi zakat di seluruh nusantara dapat memanfaatkannya tanpa harus melalui proses instalasi yang melelahkan. BAZNAS memanfaatkan software akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dalam hal sistem informasi akuntansi dikenal dengan GL ( *general ledger* ).

### *Akuntabilitas Program*

Akuntabilitas untuk program melibatkan penentuan apakah tujuan dapat dicapai atau tidak dan apakah ide-ide alternatif yang akan memberikan hasil terbesar dengan biaya serendah mungkin telah dipertimbangkan. Mustahik, muzakki, dimana BAZNAS akan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi Mustahik untuk berkembang, merupakan salah satu misi BAZNAS untuk Provinsi Sumut. Sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS juga memiliki program di bidang kemanusiaan (Sumut Peduli), Advokasi Taqwa Sumut (Dakwah),

Cerdas Sumut (Pendidikan), Ekonomi (Sumut Sejahtera), dan Kesehatan (Sumatra Utara Sehat). .

### *Akuntabilitas Kebijakan*

Akuntabilitas pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terkait dengan kebijakan akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, PP No.14 Tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, BAZNAS memiliki kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dirinci dalam catatan atas laporan keuangan. Seorang ketua harian dan beberapa kepala departemen mendukung BAZNAS dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Takwin memberikan kepada Gubernur Sumut dan DPRD Sumut laporan keuangan operasional setiap akhir tahun. Kinerja BAZNAS Sumut dievaluasi setelah auditor independen meninjau laporan keuangannya dan memberikan kesimpulan yang wajar. Pengelolaan BAZNAS yang baik akan memiliki program keunggulan yang akan dilaksanakan baik penggunaan barang muzak, penggunaan keringat hitam, maupun penetapan tabel prioritas penggunaan dana yang terkumpul.

### **KESIMPULAN**

Sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan pada BAZNAS Sumut menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Zakat) berdasarkan PSAK 109 untuk menghimpunkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Di dalam SIMBA terdapat informasi pencatatan laporan keuangan, dan publikasi laporan keuangan pada web [sumut.baznas.go.id](http://sumut.baznas.go.id). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara terlihat pada tingkat penerimaan zakat, karena kurangnya kesadaran masyarakat berzakat, bukan karena masyarakat tidak mau membayar zakat, tetapi kekurangan. Informasi dan kepercayaan tentang pembayaran zakat kepada organisasi pengelola zakat. Sistem informasi yang menghasilkan informasi digunakan untuk memantau kinerja dan mengoordinasikan operasi organisasi. Seluruh lembaga dan instansi pemerintah baik struktural maupun nonstruktural dituntut untuk menyediakan informasi publik yang akurat dan efektif di era keterbukaan informasi publik saat ini dalam strategi untuk membuat pemimpin pemerintahan yang baik terbuka dan akuntabel. Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Sumut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS adalah lembaga

bentukan pemerintah yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional dengan yayasan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat yang kompeten memiliki perencanaan prioritas yang harus dilaksanakan, juga dalam menangan target muzakki, juga dalam penyiapan dan pendayagunaan harta yang terkumpul.

## REKOMENDASI

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan serta sistem informasi akuntansi khususnya faktor yang menjadikan pengaruh muzakki untuk menyalurkan zakatnya karena pengaruh kualitas informasi mempengaruhi tingkat penerimaan zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 guna memenuhi pertanggungjawaban BAZNAS atas penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah agar tercapainya kesejahteraan dan kepercayaan membayar zakat memiliki sistem informasi akuntansi yang jelas dan akurat, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian ini diharapkan bisa membantu publik untuk mengetahui lebih jauh tentang BAZNAS Sumut atau membantu masyarakat menambah wawasan atau pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Sumut.

## REFERENSI

- Alhogbi, B. G. (2017). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Anggraini, H. (2018). *No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional*. 109.
- Asmarani, Marlia, dan R. K. (2019). *Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya*. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 8 (1).
- Fatoni, N. (2020). *Fiqh Zakat Indonesia* (edisi pert). Cv Lawwana.
- Firdaus, N., & Kusumaningtias, R. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada LAZIS Nurul Falah*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 20(2), 80. <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.24273>
- Ganyam, Amos Iorcher, dan J. A. I. (2019). *Effect of Accounting Information System on Financial Performance of Firms: A Review of Literature*. *Journal of Business and Management* 21 (5), 39–49.
- Harahap, K. R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki* (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). Skripsi UIN SU Medan.
- Hasibun, Z. K. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. 1–125.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar Dasar Analisis laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.

- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). *Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah ( LAZWASHAL )*. 9(01), 1034–1043.
- Imsar, RD. Harahap, N. H. (2023). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19 : Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut*. 4(4), 852–867.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Nugraha, D. B., Azmi, Z., Defitri, S. Y. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi*. PT Global Eksekutif Teknelogi.
- Nurhayati, S., Siswanto, D., Rahman, T. (2019). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, D. (2020). *Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1), 101.
- Rachim. (2017). *Analisis Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di badan amil zakat kabupaten Mamuju*. Di We fileejournal.
- Raihan, M., Kamila, k. *Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19*. 3(September 2021), 13–28.
- Ritonga, P. (2017). *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. *jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1.
- Selvy Wahyu Oktari. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus*.
- Siregar, S. (2016). *Problematika Fundraising Zakat (Studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. 1, 1–23.
- H Olivia, A Qorib, N Nurlaila. (2021). *The Implementation Of Analysis Zakat Accounting Standards and Accountability Of Financial Reports*. *Jurnal Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 2 (1), 402-411
- Sudarto. (2018). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Suginam, & Siregar, S. (2020). *Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 95–98.
- Supani. (2023). *Zakat Indonesia* (edisi 2). KENCANA.
- Yahya, A., Abror, K., & Anggraeni, E. (2022). (EKSYA) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina. Strategi Dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil Koin Nu Pada Upzis Nu Kecamatan Batanghari Lampung Timur*, vol.3(1), 131–149.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Gadjah Mada University Press.
- Hafiz, M., & Nasution, Y.S.(2023). *Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan seekah Pada Lembaga Zakat Alwasliyah (LAZWAZHAL)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1034-1043.
- harahap, I., Nasution, Y.S., & Saragih, S. (2022). *Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,8 (02), 1998-2009.